

SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar harga satuan pokok kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,

belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Barang.

7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.
8. Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat HST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
9. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
10. Pembangunan Rumah Negara yang selanjutnya disingkat PRN adalah bangunan yang dibangun dan dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
11. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.
12. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang selanjutnya disingkat ASDP adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
15. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

16. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
17. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
18. Jasa Konsultansi adalah kegiatan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan.
19. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
20. Pengelolaan Kelautan dan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, Alokasi Sumber Daya Ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
21. Jaringan Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.
22. Website adalah kumpulan halaman dalam domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video dan teks untuk berbagai macam kepentingan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;

- b. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) HSPK terkait dengan HST BGN tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) HSPK terkait dengan HST PRN tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) HSPK terkait dengan HST RLH OAP tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) HSPK terkait dengan HST PRBGN tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) HSPK terkait dengan HST PBGN rumah negara tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) HSPK terkait dengan PKB PBGN tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) HSPK terkait dengan SPAM tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) HSPK terkait dengan PJJ tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) HSPK terkait dengan Pekerjaan Bangunan Irigasi, Normalisasi Sungai dan Pengamanan Abrasi Pantai tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) HSPK terkait dengan Pembangunan Jalan Lingkungan tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) HSPK terkait dengan Sanitasi tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) HSPK terkait dengan Pembangunan Pagar dan Kandang Ternak tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (13) HSPK terkait dengan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (14) HSPK terkait dengan Fasilitas Keselamatan Transportasi Jalan tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (15) HSPK terkait dengan ASDP dan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (16) HSPK terkait dengan Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (17) HSPK terkait dengan Kebandarudaraan tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (18) HSPK terkait dengan Jasa Konsultansi tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (19) HSPK terkait dengan Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (20) HSPK terkait dengan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (21) HSPK terkait dengan Jaringan Internet dan Website tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (22) HSPK terkait dengan Perangkat Laboratorium Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 20 November 2024

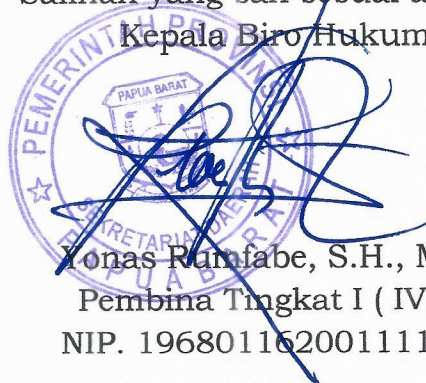
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the West Papua Province Government (Pemerintah Provinsi Papua Barat). The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT" and "SEKRETARIAT DAERAH". Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in blue ink.

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSTBGN)
TAHUN 2025

No	KABUPATEN / KOTA	P E M B A N G U N A N					
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		PAGAR GEDUNG NEGARA PER METER			JALAN LINGKUNGAN L=4 M ;T=20 CM ;K-300 PER M'
		TIDAK Sederhana (M2)	Sederhana (M2)	Depan (M')	Belakang (M')	Samping (M')	
	WILAYAH MANOKWARI RAYA						
1	KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI	Rp9.355.000,00	Rp8.286.000,00	Rp3.920.000,00	Rp3.160.000,00	Rp2.990.000,00	Rp3.400.000,00
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI	Rp9.030.000,00	Rp8.211.000,00	Rp3.920.000,00	Rp3.030.000,00	Rp2.860.000,00	Rp3.294.000,00
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI	Rp11.540.000,00	Rp9.910.000,00	Rp4.970.000,00	Rp4.410.000,00	Rp4.170.000,00	Rp5.067.000,00
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - RASIEI	Rp10.270.000,00	Rp8.750.000,00	Rp4.340.000,00	Rp3.770.000,00	Rp3.580.000,00	Rp3.970.000,00
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - ANGGI	Rp14.110.000,00	Rp11.390.000,00	Rp5.870.000,00	Rp5.830.000,00	Rp5.510.000,00	Rp8.200.000,00
	WILAYAH SORONG RAYA						
6	KOTA SORONG - SORONG	Rp9.000.000,00	Rp7.850.000,00	Rp3.820.000,00	Rp2.990.000,00	Rp2.840.000,00	Rp3.135.000,00
7	KABUPATEN SORONG - AIMAS	Rp9.200.000,00	Rp8.300.000,00	Rp4.210.000,00	Rp3.250.000,00	Rp3.080.000,00	Rp3.040.000,00
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUAN	Rp12.230.000,00	Rp10.300.000,00	Rp5.040.000,00	Rp4.510.000,00	Rp4.310.000,00	Rp6.300.000,00
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - WAISAI	Rp9.830.000,00	Rp9.210.000,00	Rp4.390.000,00	Rp3.740.000,00	Rp3.550.000,00	Rp3.770.000,00
10	KABUPATEN TAMBRAUW - FEEF	Rp9.820.000,00	Rp9.470.000,00	Rp4.290.000,00	Rp3.560.000,00	Rp3.340.000,00	Rp3.930.000,00
11	KABUPATEN MAYBRAT - KUMURKEK	Rp12.230.000,00	Rp11.120.000,00	Rp5.130.000,00	Rp4.690.000,00	Rp4.460.000,00	Rp5.259.000,00
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA						
12	KABUPATEN FAKFAK - FAKFAK	Rp12.560.000,00	Rp10.030.000,00	Rp5.140.000,00	Rp4.720.000,00	Rp4.430.000,00	Rp6.200.000,00
13	KABUPATEN KAIMANA - KAIMANA	Rp10.110.000,00	Rp8.710.000,00	Rp4.280.000,00	Rp3.540.000,00	Rp3.350.000,00	Rp4.320.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rimfale, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA (HSTPRN)
TAHUN 2025

No	KABUPATEN / KOTA	P E M B A N G U N A N										
		RUMAH NEGARA								PAGAR RUMAH NEGARA PER METER		
		TYPE A = 250 M2 PER M2	TYPE A = 250 M2 PER UNIT	TYPE B = 120 M2 PER M2	TYPE B = 120 M2 PER UNIT	TYPE C = 70 M2 TYPE D = 50 M2 TYPE E = 36 M2	TYPE C = 70 M2 PER UNIT	TYPE D = 50 M2 PER UNIT	TYPE E = 36 M2 PER UNIT	DEPAN (M')	BELAKANG (M')	SAMPING (M')
	WILAYAH MANOKWARI RAYA											
1	KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI	Rp 9.412.000	Rp 2.353.000.000	Rp 9.316.600	Rp 1.117.992.000	Rp 6.263.500	Rp 438.445.000	Rp 313.175.000	Rp 225.486.000	Rp 3.610.000	Rp 2.020.000	Rp 1.880.000
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI	Rp 8.950.000	Rp 2.237.500.000	Rp 9.010.000	Rp 1.081.200.000	Rp 6.761.400	Rp 473.298.000	Rp 338.070.000	Rp 243.410.400	Rp 3.670.000	Rp 1.960.000	Rp 1.830.000
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI	Rp 10.990.000	Rp 2.747.500.000	Rp 11.030.000	Rp 1.323.600.000	Rp 7.830.000	Rp 548.100.000	Rp 391.500.000	Rp 281.880.000	Rp 4.450.000	Rp 2.910.000	Rp 2.690.000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - RASIEI	Rp 9.770.000	Rp 2.442.500.000	Rp 9.810.000	Rp 1.177.200.000	Rp 6.930.000	Rp 485.100.000	Rp 346.500.000	Rp 249.480.000	Rp 3.940.000	Rp 2.440.000	Rp 2.290.000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - ANGGI	Rp 14.112.000	Rp 3.528.000.000	Rp 13.520.000	Rp 1.622.400.000	Rp 10.875.000	Rp 761.250.000	Rp 543.750.000	Rp 391.500.000	Rp 5.180.000	Rp 3.900.000	Rp 3.560.000
	WILAYAH SORONG RAYA											
6	KOTA SORONG - SORONG	Rp 9.130.000	Rp 2.282.500.000	Rp 9.110.000	Rp 1.093.200.000	Rp 6.028.500	Rp 421.995.000	Rp 301.425.000	Rp 217.026.000	Rp 3.510.000	Rp 1.870.000	Rp 1.760.000
7	KABUPATEN SORONG - AIMAS	Rp 9.570.000	Rp 2.392.500.000	Rp 9.740.000	Rp 1.168.800.000	Rp 6.365.000	Rp 445.550.000	Rp 318.250.000	Rp 229.140.000	Rp 3.850.000	Rp 2.040.000	Rp 1.900.000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUA	Rp 11.600.000	Rp 2.900.000.000	Rp 11.820.000	Rp 1.418.400.000	Rp 7.690.000	Rp 538.300.000	Rp 384.500.000	Rp 276.840.000	Rp 4.490.000	Rp 2.900.000	Rp 2.750.000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - WAISAI	Rp 10.440.000	Rp 2.610.000.000	Rp 10.540.000	Rp 1.264.800.000	Rp 6.870.000	Rp 480.900.000	Rp 343.500.000	Rp 247.320.000	Rp 4.070.000	Rp 2.450.000	Rp 2.310.000
10	KABUPATEN TAMBRAUW - FEEF	Rp 10.470.000	Rp 2.617.500.000	Rp 10.680.000	Rp 1.281.600.000	Rp 7.042.000	Rp 492.940.000	Rp 352.100.000	Rp 253.512.000	Rp 3.970.000	Rp 2.320.000	Rp 2.140.000
11	KABUPATEN MAYBRAT - KUMURKEK	Rp 12.260.000	Rp 3.065.000.000	Rp 12.560.000	Rp 1.507.200.000	Rp 8.040.000	Rp 562.800.000	Rp 402.000.000	Rp 289.440.000	Rp 4.600.000	Rp 3.080.000	Rp 2.890.000
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA											
12	KABUPATEN FAKFAK - FAKFAK	Rp 11.850.000	Rp 2.962.500.000	Rp 11.950.000	Rp 1.434.000.000	Rp 8.140.000	Rp 569.800.000	Rp 407.000.000	Rp 293.040.000	Rp 4.640.000	Rp 3.150.000	Rp 2.890.000
13	KABUPATEN KAIMANA. - KAIMANA	Rp 10.060.000	Rp 2.515.000.000	Rp 10.360.000	Rp 1.243.200.000	Rp 7.142.800	Rp 499.996.000	Rp 357.140.000	Rp 257.140.800	Rp 3.950.000	Rp 2.280.000	Rp 2.130.000

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Yonas Rumilabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
HARGA SATUAN TERTINGGI RUMAH LAYAK HUNI (RLH) OAP
TAHUN 2025

No	KABUPATEN / KOTA	P E M B A N G U N A N	
		RUMAH LAYAK HUNI (RLH) OAP TYPE 45 PER M2	RUMAH LAYAK HUNI (RLH) OAP TYPE 45 PER UNIT
	WILAYAH MANOKWARI RAYA		
1	KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI	Rp6.263.500,00	Rp281.857.500,00
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI	Rp6.761.400,00	Rp304.263.000,00
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI	Rp7.830.000,00	Rp352.350.000,00
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - RASIEI	Rp6.930.000,00	Rp311.850.000,00
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - ANGGI	Rp10.875.000,00	Rp489.375.000,00
	WILAYAH SORONG RAYA		
6	KOTA SORONG - SORONG	Rp6.028.500,00	Rp271.282.500,00
7	KABUPATEN SORONG - AIMAS	Rp6.365.000,00	Rp286.425.000,00
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUAN	Rp7.690.000,00	Rp346.050.000,00
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - WAISAI	Rp6.870.000,00	Rp309.150.000,00
10	KABUPATEN TAMBRAUW - FEEF	Rp7.042.000,00	Rp316.890.000,00
11	KABUPATEN MAYBRAT - KUMURKEK	Rp8.040.000,00	Rp361.800.000,00
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA		
12	KABUPATEN FAKFAK - FAKFAK	Rp8.140.000,00	Rp366.300.000,00
13	KABUPATEN KAIMANA. - KAIMANA	Rp7.142.800,00	Rp321.426.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Yonas Kaniaba, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

HARGA SATUAN TERTINGGI PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN 2025

NO	KABUPATEN / KOTA	PEMELIHARAAN RUTIN PER TAHUN								PAGAR GEDUNG NEGARA (M')	PAGAR RUMAH NEGARA (M')
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		RUMAH NEGARA PER UNIT							
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	TYPE A = 250 M2	TYPE B = 120 M2	TYPE C = 70 M2	TYPE D = 50 M2	TYPE E = 36 M2			
	WILAYAH MANOKWARI RAYA										
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp187.100,00	Rp165.720,00	Rp47.060.000,00	Rp186.332,00	Rp8.768.900,00	Rp6.263.500,00	Rp4.509.720,00	Rp78.400,00	Rp72.200,00	
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp180.600,00	Rp164.220,00	Rp44.750.000,00	Rp180.200,00	Rp9.465.960,00	Rp6.761.400,00	Rp4.868.208,00	Rp78.400,00	Rp73.400,00	
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp230.800,00	Rp198.200,00	Rp54.950.000,00	Rp220.600,00	Rp10.962.000,00	Rp7.830.000,00	Rp5.637.600,00	Rp99.400,00	Rp89.000,00	
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp205.400,00	Rp175.000,00	Rp48.850.000,00	Rp196.200,00	Rp9.702.000,00	Rp6.930.000,00	Rp4.989.600,00	Rp86.800,00	Rp78.800,00	
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp282.200,00	Rp227.800,00	Rp70.560.000,00	Rp270.400,00	Rp15.225.000,00	Rp10.875.000,00	Rp7.830.000,00	Rp117.400,00	Rp103.600,00	
	WILAYAH SORONG RAYA										
6	KOTA SORONG	Rp180.000,00	Rp157.000,00	Rp45.650.000,00	Rp182.200,00	Rp8.439.900,00	Rp6.028.500,00	Rp4.340.520,00	Rp76.400,00	Rp70.200,00	
7	KABUPATEN SORONG	Rp184.000,00	Rp166.000,00	Rp47.850.000,00	Rp194.800,00	Rp8.911.000,00	Rp6.365.000,00	Rp4.582.800,00	Rp84.200,00	Rp77.000,00	
8	KABUPATEN SOSORNG SELATAN	Rp244.600,00	Rp206.000,00	Rp58.000.000,00	Rp236.400,00	Rp10.766.000,00	Rp7.690.000,00	Rp5.536.800,00	Rp100.800,00	Rp89.800,00	
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp196.600,00	Rp184.200,00	Rp52.200.000,00	Rp210.800,00	Rp9.618.000,00	Rp6.870.000,00	Rp4.946.400,00	Rp87.800,00	Rp81.400,00	
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp196.400,00	Rp189.400,00	Rp52.350.000,00	Rp213.600,00	Rp9.858.800,00	Rp7.042.000,00	Rp5.070.240,00	Rp85.800,00	Rp79.400,00	
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp244.600,00	Rp222.400,00	Rp61.300.000,00	Rp251.200,00	Rp11.256.000,00	Rp8.040.000,00	Rp5.788.800,00	Rp102.600,00	Rp92.000,00	
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA										
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp251.200,00	Rp200.600,00	Rp59.250.000,00	Rp239.000,00	Rp11.396.000,00	Rp8.140.000,00	Rp5.860.800,00	Rp102.800,00	Rp92.800,00	
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp202.200,00	Rp174.200,00	Rp50.300.000,00	Rp207.200,00	Rp9.999.920,00	Rp7.142.800,00	Rp5.142.816,00	Rp85.600,00	Rp79.000,00	

Fj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Yonas Ramfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

**HARGA SATUAN TERTINGGI PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - RUMAH NEGARA
TAHUN 2025**

[illegible]

[illegible]

No	KABUPATEN / KOTA	PERAWATAN BERAT (MAX KERUSAKAN 65%)								
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		RUMAH NEGARA PER UNIT					PAGAR GEDUNG NEGARA (M')	PAGAR RUMAH NEGARA (M')
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	TYPE A = 250 M2	TYPE B = 120 M2	TYPE C = 70 M2	TYPE D = 50 M2	TYPE E = 36 M2		
	WILAYAH MANOKWARI RAYA									
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp6.080.750,00	Rp5.385.900,00	Rp1.529.450.000,00	Rp726.694.800,00	Rp284.989.250,00	Rp203.563.750,00	Rp146.565.900,00	Rp0,00	Rp0,00
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp5.869.500,00	Rp5.337.150,00	Rp1.454.375.000,00	Rp702.780.000,00	Rp307.643.700,00	Rp219.745.500,00	Rp158.216.760,00	Rp0,00	Rp0,00
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp7.501.000,00	Rp6.441.500,00	Rp1.785.875.000,00	Rp860.340.000,00	Rp356.265.000,00	Rp254.475.000,00	Rp183.222.000,00	Rp0,00	Rp0,00
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp6.675.500,00	Rp5.687.500,00	Rp1.587.625.000,00	Rp765.180.000,00	Rp315.315.000,00	Rp225.225.000,00	Rp162.162.000,00	Rp0,00	Rp0,00
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARAFAK - IBUKOTA	Rp9.171.500,00	Rp7.403.500,00	Rp2.293.200.000,00	Rp1.054.560.000,00	Rp494.812.500,00	Rp353.437.500,00	Rp254.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00
	WILAYAH SORONG RAYA									
6	KOTA SORONG - IBUKOTA	Rp5.850.000,00	Rp5.102.500,00	Rp1.483.625.000,00	Rp710.580.000,00	Rp274.296.750,00	Rp195.926.250,00	Rp141.066.900,00	Rp0,00	Rp0,00
7	KABUPATEN SORONG - IBUKOTA	Rp5.980.000,00	Rp5.395.000,00	Rp1.555.125.000,00	Rp759.720.000,00	Rp289.607.500,00	Rp206.862.500,00	Rp148.941.000,00	Rp0,00	Rp0,00
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - IBUKOTA	Rp7.949.500,00	Rp6.695.000,00	Rp1.885.000.000,00	Rp921.960.000,00	Rp349.895.000,00	Rp249.925.000,00	Rp179.946.000,00	Rp0,00	Rp0,00
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - IBUKOTA	Rp6.389.500,00	Rp5.986.500,00	Rp1.696.500.000,00	Rp822.120.000,00	Rp312.585.000,00	Rp223.275.000,00	Rp160.758.000,00	Rp0,00	Rp0,00
10	KABUPATEN TAMBRAUW - IBUKOTA	Rp6.383.000,00	Rp6.155.500,00	Rp1.701.375.000,00	Rp833.040.000,00	Rp320.411.000,00	Rp228.865.000,00	Rp164.782.800,00	Rp0,00	Rp0,00
11	KABUPATEN MAYBRAT - IBUKOTA	Rp7.949.500,00	Rp7.228.000,00	Rp1.992.250.000,00	Rp979.680.000,00	Rp365.820.000,00	Rp261.300.000,00	Rp188.136.000,00	Rp0,00	Rp0,00
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA									
12	KABUPATEN FAKFAK - IBUKOTA	Rp8.164.000,00	Rp6.519.500,00	Rp1.925.625.000,00	Rp932.100.000,00	Rp370.370.000,00	Rp264.550.000,00	Rp190.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00
13	KABUPATEN KAIMANA - IBUKOTA	Rp6.571.500,00	Rp5.661.500,00	Rp1.634.750.000,00	Rp808.080.000,00	Rp324.997.400,00	Rp232.141.000,00	Rp167.141.520,00	Rp0,00	Rp0,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Yonas Rumabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN 2025

KLASIFIKASI BANGUNAN SEDERHANA												
BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp)	0	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000
KOMPONEN BIAYA	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000	500.000	500.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	18,11	18,11 sd 15,03	15,03 sd 12,39	12,39 sd 10,10	10,10 sd 8,00	8,00 sd 6,30	6,30 sd 4,80	4,80 sd 3,70	3,70 sd 2,80	2,80 sd 2,08	2,08 sd 1,80	1,80
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	12,40	12,40 sd 9,80	9,80 sd 7,72	7,72 sd 6,30	6,30 sd 5,10	5,10 sd 4,00	4,00 sd 3,10	3,10 sd 2,40	2,40 sd 1,90	1,90 sd 1,50	1,50 sd 1,36	1,36
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	14,60	14,60 sd 10,47	10,47 sd 7,07	7,07 sd 4,40	4,40 sd 2,97	2,97 sd 1,98	1,98 sd 1,25	1,25 sd 0,83	0,83 sd 0,56	0,56 sd 0,37	0,37 sd 0,26	0,26

KLASIFIKASI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp)	0	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000
KOMPONEN BIAYA	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000	500.000	500.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	19,80	19,80 sd 16,40	16,40 sd 13,50	13,50 sd 11,10	11,10 sd 9,10	9,10 sd 7,30	7,30 sd 5,80	5,80 sd 4,60	4,60 sd 3,64	3,64 sd 3,80	3,80 sd 2,32	2,32
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	18,35	18,35 sd 15,19	15,19 sd 12,50	12,50 sd 10,28	10,28 sd 8,30	8,30 sd 6,76	6,76 sd 5,37	5,37 sd 4,26	4,26 sd 3,37	3,37 sd 2,59	2,59 sd 2,15	2,15
3. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	14,20	14,20 sd 11,75	11,75 sd 9,67	9,67 sd 7,95	7,95 sd 6,52	6,52 sd 5,23	5,23 sd 4,15	4,15 sd 3,29	3,29 sd 2,60	2,60 sd 2,00	2,00 sd 1,66	1,66
4. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16,00	16,00 sd 11,25	11,25 sd 8,21	8,21 sd 5,92	5,92 sd 4,43	4,43 sd 2,90	2,90 sd 1,92	1,92 sd 1,26	1,26 sd 0,72	0,72 sd 0,42	0,42 sd 0,28	0,28

KLASIFIKASI KHUSUS

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp)	0 sd	250 sd	500 sd	1.000 sd	2.500 sd	5.000 sd	10.000 sd	25.000 sd	50.000 sd	100.000 sd	250.000 sd	500.000
KOMPONEN BIAYA	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	22,00	22,00 sd 18,20	18,20 sd 15,16	15,16 sd 12,50	12,50 sd 10,24	10,24 sd 8,20	8,20 sd 6,50	6,50 sd 5,10	5,10 sd 4,00	4,00 sd 3,15	3,15 sd 2,75	2,75
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	19,80	19,80 sd 16,50	16,50 sd 13,60	13,60 sd 11,20	11,20 sd 9,10	9,10 sd 7,20	7,20 sd 5,60	5,60 sd 4,30	4,30 sd 3,30	3,30 sd 2,60	2,60 sd 2,30	2,30
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16,00	16,00 sd 11,25	11,25 sd 8,21	8,21 sd 5,92	5,92 sd 4,43	4,43 sd 2,90	2,90 sd 1,92	1,92 sd 1,26	1,26 sd 0,72	0,72 sd 0,42	0,42 sd 0,28	0,28

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Yongis Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196804162001111001



LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2025

No	KABUPATEN / KOTA	PENGEMBANGAN PERPIPAAN PER 1 M'	PEMBANGUNAN RESERVOIR 9 M3	PEMBANGUNAN BRONGKAPTERING 8,5 M3	KETERANGAN
	WILAYAH MANOKWARI RAYA				
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp706.000,00	Rp329.144.809,28	Rp36.373.187,36	PIPA HDPE DIA. 6"
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp968.000,00	Rp324.260.941,68	Rp36.167.135,26	PIPA HDPE DIA. 6"
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp484.000,00	Rp335.105.460,97	Rp36.581.444,28	PIPA HDPE DIA. 4"
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp861.000,00	Rp335.000.000,00	Rp363.620.232,62	PIPA HDPE DIA. 6"
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp448.629,18	Rp336.430.874,96	Rp36.703.771,67	
	WILAYAH SORONG RAYA				
6	KOTA SORONG	Rp447.901,70	Rp326.349.279,97	Rp36.212.034,54	
7	KABUPATEN SORONG	Rp446.181,40	Rp310.140.778,04	Rp34.404.510,87	
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp511.000,00	Rp339.208.713,40	Rp36.797.760,43	PIPA HDPE DIA. 6"
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp447.989,93	Rp326.625.351,05	Rp36.318.744,62	
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp527.000,00	Rp325.019.128,44	Rp36.285.555,33	PIPA HDPE DIA. 6"
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp511.000,00	Rp339.501.955,17	Rp36.844.713,49	PIPA HDPE DIA. 6"
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA				
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp1.015.000,00	Rp336.430.874,96	Rp36.703.771,67	PIPA HDPE DIA. 6"
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp815.000,00	Rp320.563.564,39	Rp36.118.218,75	PIPA HDPE DIA. 4"

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PEKERJAAN JALAN JEMBATAN TAHUN 2025

NO	PEKERJAAN	SPEK	SATUAN	HARGA
1	Pembangunan Jalan - MKW RAYA	Konstruksi Dengan Timbunan Pilihan	Km	Rp3.000.000.000,00
2	Rekonstruksi Jalan - MKW RAYA	Konstruksi dengan Lapen	Km	Rp3.500.000.000,00
3	Rekonstruksi Jalan - MKW RAYA	Konstruksi dengan HRS	Km	Rp5.000.000.000,00
4	Rekonstruksi Jalan - MKW RAYA	Konstruksi dengan Rigid	Km	Rp8.000.000.000,00
5	Rehabilitasi Jalan - MKW RAYA	(Rehabilitasi Pada Permukaan)	Km	Rp3.500.000.000,00
6	Pembangunan Box Culvert	Termasuk Timbunan oprit dan Perkerasan Diatasnya	Unit	Rp1.000.000.000,00
7	Pembangunan Plat Dekker	Termasuk Perkerasan Diatasnya	Unit	Rp500.000.000,00
8	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Sumuran + Balok T	M'	Rp275.000.000,00
9	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Pancang + Balok T	M'	Rp300.000.000,00
10	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Sumuran + Girder Baja	M'	Rp325.000.000,00
11	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Sumuran + Rangka Baja	M'	Rp350.000.000,00
12	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Pancang + Girder Baja	M'	Rp350.000.000,00
13	Pembangunan Jembatan - MKW RAYA	Pondasi Pancang + Rangka Baja	M'	Rp400.000.000,00
14	Pemeliharaan Berkala Jalan - MKW RAYA	Pembersihan atau Pengecoran Bahu Jalan	M'	Rp2.000.000,00
15	Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan	Preservasi Jalan	M'	Rp120.000.000,00
16	Pemeliharaan Berkala Jalan	Preservasi Jalan	M'	Rp1.500.000.000,00
17	Rehabilitasi Mayor Jalan	Preservasi Jalan	M'	Rp5.500.000.000,00
18	Rehabilitasi Minor Jalan	Preservasi Jalan	M'	Rp3.500.000.000,00
19	Preservasi Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan + Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan + Pemeliharaan Berkala Jalan + Rehabilitasi Mayor Jalan + Rehabilitasi Minor Jalan	M'	Rp7.000.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

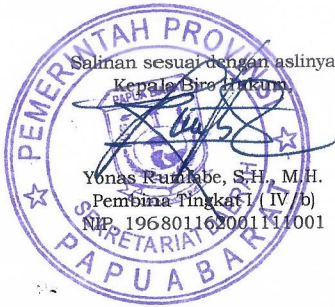
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

PEKERJAAN BANGUNAN IRIGASI , NORMALISASI SUNGAI DAN PENGAMAN ABRASI PANTAI
TAHUN 2025

No	KABUPATEN / KOTA	BANGUNAN IRIGASI							NORMALISASI SUNGAI		
		BENDUNG		SALURAN PRIMER		SALURAN SEKUNDER		JALAN INSPEKSI (m')	JENIS KONSTRUKSI		BRONJONG (m')
		FREE INTAKE (buah)	BENDUNG (buah)	PAS. BATU (m')	PRECAST/BETON (m')	PAS. BATU (m')	PRECAST/BET ON (m')		PAS. BATU (m')	KONSTRUKSI BETON (m')	
	WILAYAH MANOKWARI RAYA										
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp20.000.000.000,00	Rp34.500.000.000,00	Rp3.277.500,00	Rp3.450.000,00	Rp2.645.000,00	Rp2.875.000,00	Rp2.472.501,40	Rp17.035.640,00	-	Rp11.553.617,60
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN -	-	-	-	-	-	-	-	Rp17.035.870,00	-	Rp11.553.617,60
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp20.000.000.000,00	Rp34.500.000.000,00	-	Rp4.025.000,00	-	Rp3.220.000,00	Rp2.570.250,37	-	Rp15.386.052,03	-
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	-	-	-	-	-	-	-	Rp17.035.640,00	-	Rp11.553.617,60
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - II	-	-	-	-	-	-	-	Rp17.035.640,00	-	Rp11.553.617,60
	WILAYAH SORONG RAYA										
6	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	Rp18.179.500,00	-	Rp16.150.000,00
7	KABUPATEN SORONG	Rp21.000.000.000,00	Rp35.500.000.000,00	Rp3.565.000,00	Rp4.082.500,00	Rp3.105.000,00	Rp3.450.000,00	Rp2.530.000,00	Rp18.241.600,00	-	Rp16.540.000,00
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp25.000.000.000,00	Rp38.500.000.000,00	Rp4.600.000,00	Rp5.750.000,00	Rp3.450.000,00	Rp4.025.000,00	Rp3.220.000,00	Rp20.930.000,00	-	Rp17.100.000,00
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	Rp19.200.000,00	-	Rp17.700.000,00
10	KABUPATEN TAMBRAUW	-	-	-	-	-	-	-	Rp17.000.000,00	-	Rp15.500.000,00
11	KABUPATEN MAYBRAT	-	-	-	-	-	-	-	Rp21.112.000,00	-	Rp18.200.000,00
	WILAYAH BOMBERAY RAYA										
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp40.000.000.000,00	Rp70.000.000.000,00	Rp5.270.000,00	Rp8.000.000,00	Rp4.030.000,00	Rp6.032.000,00	Rp3.540.000,00	Rp16.800.000,00	-	Rp15.780.000,00
13	KABUPATEN KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	Rp16.230.000,00	-	Rp15.220.000,00

No	KABUPATEN / KOTA	PENGAMAN ABRASI PANTAI			PEMELIHARAAN IRIGASI		PEMELIHARAAN NORMALISASI		PEMELIHARAAN ABRASI PANTAI	
		BREAK WATER (KUBUS BETON) (m')	REVETMENT (m')	TALUD (PAS. BATU) (m')	RUTIN (m')	BERKALA (m')	RUTIN (m')	BERKALA (m')	RUTIN (m')	BERKALA (m')
	WILAYAH MANOKWARI RAYA									
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp25.110.000,30	Rp25.090.000,02	Rp12.558.368,00	Rp2.123.030,40	Rp4.070.311,60	-	Rp7.170.321,33	-	Rp2.294.018,00
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN -	Rp25.231.000,23	Rp25.131.000,20	Rp12.581.632,00	-	-	-	Rp7.500.761,70	-	Rp2.486.128,30
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	-	-	-	Rp4.121.200,33	Rp6.113.015,40	-	Rp11.030.378,40	-	-
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp25.412.000,41	Rp25.213.000,30	Rp12.635.796,00	-	-	-	Rp11.060.338,75	-	Rp2.843.095,77
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - II	-	-	-	-	-	-	Rp13.200.241,29	-	-
	WILAYAH SORONG RAYA									
6	KOTA SORONG	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00	Rp17.000.000,00	-	-	-	Rp7.170.321,33	-	Rp2.294.018,00
7	KABUPATEN SORONG	Rp27.330.000,00	Rp27.330.000,00	Rp17.330.000,00	Rp2.123.030,40	Rp4.500.311,60	-	Rp7.500.761,70	-	Rp2.294.018,00
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	-	-	-	Rp2.123.030,40	Rp4.500.311,60	-	Rp11.030.378,40	-	-
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp28.420.000,00	Rp28.420.000,00	Rp18.420.000,00	-	-	-	Rp11.060.338,75	-	Rp2.294.018,00
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp28.420.000,00	Rp28.420.000,00	Rp18.420.000,00	-	-	-	Rp13.200.241,29	-	Rp2.294.018,00
11	KABUPATEN MAYBRAT	-	-	-	-	-	-	Rp13.200.241,29	-	-
	WILAYAH BOMBERAY RAYA									
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp27.850.000,00	Rp28.200.000,00	Rp17.360.000,00	Rp2.123.030,40	Rp4.500.311,60	-	Rp8.720.761,70	-	Rp3.544.018,00
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp27.500.000,00	Rp27.430.000,00	Rp16.430.000,00	-	-	-	Rp7.500.761,70	-	Rp2.294.018,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

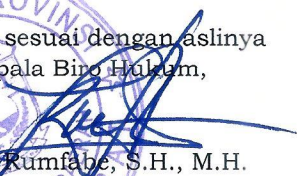


LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN TAHUN 2025

No	KABUPATEN / KOTA	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'20 MPa)1 M'	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'19,3 MPa)1 M'
	WILAYAH MANOKWARI RAYA		
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp2.950.000,00	
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp3.182.000,00	
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp3.200.000,00	
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA		
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA		Rp3.400.000,00
	WILAYAH SORONG RAYA		
6	KOTA SORONG	Rp2.800.000,00	
7	KABUPATEN SORONG	Rp2.900.000,00	
8	KABUPATEN SORONG SELATAN		Rp3.405.000,00
9	KABUPATEN RAJA AMPAT		Rp3.650.000,00
10	KABUPATEN TAMBRAUW		Rp4.300.000,00
11	KABUPATEN MAYBRAT		Rp4.667.000,00
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA		
12	KABUPATEN FAKFAK		Rp3.650.000,00
13	KABUPATEN KAIMANA		Rp3.100.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

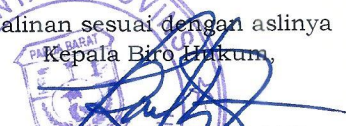
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

SANITASI TAHUN 2025

No	KABUPATEN / KOTA	PEMBANGUNAN CUBRUK	PEMBANGUNAN SEPTIC TANK
	WILAYAH MANOKWARI RAYA		
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp50.000.000,00	Rp70.000.000,00
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp55.000.000,00	Rp75.000.000,00
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp50.000.000,00	Rp75.000.000,00
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp55.000.000,00	Rp75.000.000,00
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp60.000.000,00	Rp80.000.000,00
	WILAYAH SORONG RAYA		
6	KOTA SORONG	Rp50.000.000,00	Rp60.000.000,00
7	KABUPATEN SORONG	Rp50.000.000,00	Rp60.000.000,00
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp55.000.000,00	Rp75.000.000,00
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp55.000.000,00	Rp75.000.000,00
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp55.000.000,00	Rp75.000.000,00
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp55.000.000,00	Rp75.000.000,00
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA		
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp55.000.000,00	Rp75.000.000,00
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp55.000.000,00	Rp75.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

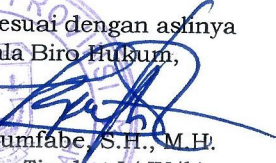
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumirabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PAGAR DAN KANDANG TERNAK TAHUN 2025

No	KABUPATEN / KOTA	KANDANG PENEDUH 1 M2	PAGAR LUAR M'	KANDANG KAMBING M2	KANDANG AYAM M2	KANDANG BABI M2
	WILAYAH MANOKWARI RAYA					
1	KABUPATEN MANOKWARI	Rp2.401.000,00	Rp387.200,00	Rp4.921.328,57	Rp1.720.800,00	Rp4.921.328,57
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp2.401.000,00	Rp387.200,00	Rp4.921.328,57	Rp1.720.800,00	Rp4.921.328,57
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp3.001.300,00	Rp484.000,00	Rp6.151.628,57	Rp2.151.000,00	Rp6.151.628,57
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp3.001.300,00	Rp484.000,00	Rp6.151.628,57	Rp2.151.000,00	Rp6.151.628,57
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp4.802.000,00	Rp774.300,00	Rp9.842.657,14	Rp3.441.500,00	Rp9.842.657,14
	WILAYAH SORONG RAYA					
6	KOTA SORONG	Rp2.401.000,00	Rp387.200,00	Rp4.921.328,57	Rp1.720.800,00	Rp4.921.328,57
7	KABUPATEN SORONG	Rp2.401.000,00	Rp387.200,00	Rp4.921.328,57	Rp1.720.800,00	Rp4.921.328,57
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp3.601.500,00	Rp580.800,00	Rp7.381.992,86	Rp2.581.200,00	Rp7.381.992,86
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp3.601.500,00	Rp580.800,00	Rp7.381.992,86	Rp2.581.200,00	Rp7.381.992,86
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp3.601.500,00	Rp580.800,00	Rp7.381.992,86	Rp2.581.200,00	Rp7.381.992,86
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp3.601.500,00	Rp580.800,00	Rp7.381.992,86	Rp2.581.200,00	Rp7.381.992,86
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA					
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp3.001.300,00	Rp484.000,00	Rp6.151.628,57	Rp2.151.000,00	Rp6.151.628,57
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp3.001.300,00	Rp484.000,00	Rp6.151.628,57	Rp2.151.000,00	Rp6.151.628,57

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2024

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pembuatan Lubang Tanam dan Penanaman)	Ha	2.500.000,00	
2	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Persiapan Lahan Komoditas Tanaman Pangan)	Ha	2.000.000,00	
3	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pemeliharaan Komoditas Tanaman Pangan)	Ha	3.000.000,00	
4	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Persiapan Lahan Komoditas Hortikultura)	Ha	2.000.000,00	
5	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pemeliharaan Komoditas Hortikultura)	Ha	3.000.000,00	
6	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Persiapan Lahan Komoditas Perkebunan)	Ha	2.500.000,00	
7	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pembuatan Lubang Tanam dan Penanaman Komoditas perkebunan)	Ha	4.000.000,00	
8	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Optimalisasi Lahan Padi/Jagung/Kedelai)	Ha	3.750.000,00	
9	Pengukuran Lokasi	Ha	550.000,00	
10	Pembersihan Lokasi	Ha	1.650.000,00	
11	Pemasangan Ajir	batang	1.650,00	
12	Penanaman	bibit	2.750,00	
13	Penyulaman	bibit	2.750,00	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumfah, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

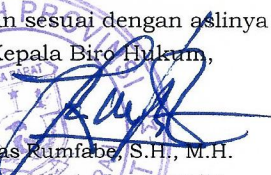
No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
1	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (uk. 75x75 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp1.352.606,80
2	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (uk. 90x90 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp1.887.743,14
3	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (uk. 120x180 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp12.324.615,74
4	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (uk. 120x240 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp14.255.859,00
5	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan Portal Bentang 18 m (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp120.610.034,48
6	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4 m) Type 1 : Terminal End Masuk ke Dalam Tanah			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp8.880.853,09
7	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Dengan Rambu Chevron) Type 1 : Terminal End Masuk ke Dalam Tanah			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp11.188.164,56
8	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4 m) Type 2: Terminal End Lengkung			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp6.251.838,61
9	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (uk. 3x120 mm) (Thermoplastic)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp3.187.436,00
10	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (uk. 3x120 mm) (Coldplastic)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp34,50
11	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan (uk. 10x10x2 cm)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp260,24
12	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan (uk. 10x15x2)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp267,94
13	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp278,09
14	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya (Solar Cell)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp542,58
15	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp52.403.274,14
16	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) Tiang Lurus			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp32.975.876,76
17	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) Tiang Lengkung			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp39.225.876,76

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
18	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 3 (Tiga) Persimpangan			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp168.600.449,16
19	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 4 (Empat) Persimpangan			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp195.318.322,44
20	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp750,89
21	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp595,89
22	Pengadaan & Pemasangan Cermin Tikungan			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp4.926.332,34
23	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Tenaga Surya			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp378.732.475,95
24	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Tenaga Surya Simpang 3			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp358.094.745,95
25	Pengadaan & Pemasangan LPJU Konvensional			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp15.045.605,14
26	Pengadaan & Pemasangan LPJU Solar Cell			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp34.887.489,68
27	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Dengan Rambu Chevron) Type 2 : Terminal End Lengkung			
	Harga per- Buah	Buah	1	Rp10.061.216,76

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001



LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

ASDP DAN KEPELABUHANAN

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
ASDP				
1	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Pekerjaan Persiapan	Paket	1	Rp1.400.802.029,44
2	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Causeway (108.72 M2)	M2	1	Rp592.031.298,75
3	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Trestle (432,25 M2)	M2	1	Rp3.799.536.297,11
4	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Dudukan Trestle / Abutment	Buah	1	Rp514.996.032,10
5	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Dudukan Moveable Bridge	Buah	1	Rp2.295.926.887,15
6	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Mooring Dolphin	Buah	1	Rp2.844.706.987,31
7	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Breasting Dolphin	Buah	1	Rp13.967.451.491,61
8	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Dudukan Hidrolik	Buah	1	Rp2.281.134.562,36
9	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Pelindung MB	Buah	1	Rp1.459.428.585,86
10	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Catwalk	m2	1	Rp524.912.950,48
11	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Dudukan dan Ruang Kontrol	Buah	1	Rp230.479.221,10
12	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Rumah Kontrol	M2	1	Rp110.890.712,85
13	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Pembuatan Jalan dan Lapangan Penetrasi Dengan Kolakan (L=2.150 M2, TEBAL = 7 CM)	M2	1	Rp130.815.488,94
14	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Pembangunan Moveable Bridge	M2	1	Rp5.022.656.083,07
15	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Hidrolik	Paket	1	Rp6.192.061.431,00
16	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Lampu Penerangan	Paket	1	Rp325.665.200,00

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
	Kepelabuhanan			
17	Pembangunan Causeway (100 m x 5 m) t : 3m	m2	1	Rp5.935.476,00
18	Pembangunan Talud (t=2 m) (5 m')	m'	1	Rp10.887.348,00
19	Pembangunan Talud (t=2,1 m sd 3,5 m) (5 m')	m'	1	Rp17.317.458,00
20	Pembangunan Talud (t=3,6 m sd 5 m) (5 m')	m'	1	Rp29.660.262,00
21	Pengaspalan Lapangan Parkir (30 m x 25 m)	m2	1	Rp1.808.821,00
22	Pengaspalan Lapangan Penumpukan (30 m x 25 m)	m2	1	Rp1.703.764,00
23	Pengaspalan Jalan Pelabuhan (100 m x 5 m)	m2	1	Rp1.840.240,00
24	Pembangunan Dermaga Beton Tiang Pipa Baja 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	Rp17.766.630,00
25	Pembangunan Dermaga Beton Tiang Pipa Beton 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	Rp12.866.971,00
26	Pembangunan Trestle Beton Tiang Pipa Baja 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	Rp16.236.842,00
27	Pembangunan Trestle Beton Tiang Pipa Beton 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	Rp11.593.370,00
28	Pengerukan dengan Kapal Non Hopper - Karang (95.040 m3)	m3	1	Rp320.932,00
29	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak DA ≤ 6 Nmil) Kap. Produksi =4.016 m3/hari	m3	1	Rp54.600,00
30	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil) Kap.Produksi = 3,264	m3	1	Rp67,20
31	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil) Kap.Produksi = 2,752	m3	1	Rp79,70
32	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak DA ≥ 16 Nmil) Kap. Produksi =1,936 m3 / hari	m3	1	Rp113.300,00
33	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak DA ≤ 6 Nmil) Kap. Produksi =5.823 m3 /hari	m3	1	Rp44.800,00
34	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil) Kap.Produksi = 4.773 m3/hari	m3	1	Rp55.100,00
35	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil)Kap.Produksi = 3.990 m3/hari	m3	1	Rp65.400,00
36	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak DA ≥ 16 Nmil)Kap. Produksi =2.807 m3 /hari	m3	1	Rp93.000,00

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
37	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak DA ≤ 6 Nmil)Kap. Produksi =8.032 m3 /hari	m3	1	Rp43.200,00
38	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil)Kap.Produksi = 6.528 m3/hari	m3	1	Rp53.200,00
39	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil)Kap.Produksi = 5.504 m3/hari	m3	1	Rp63.100,00
40	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak DA ≥ 16 Nmil)Kap. Produksi= 3.872 m3 /hari	m3	1	Rp89.700,00
41	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak DA ≤ 6Nmil)Kap. Produksi = 1.800 m3 /hari	m3	1	Rp54.100,00
42	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak 6 < DA ≤12 Nmil)Kap. Produksi = 1.376 m3 /hari	m3	1	Rp70.700,00
43	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak 12 < DA≤ 16 Nmil)Kap. Produksi = 1.176 m3 /hari	m3	1	Rp82.800,00
44	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak DA ≥ 16Nmil)Kap. Produksi= 856 m3 /hari	m3	1	Rp113.700,00
45	Mobilisasi Kapal Type TSHD 2000	mil	1	Rp1.015.500,00
46	Mobilisasi Kapal Type TSHD 2900	mil	1	Rp1.198.300,00
47	Mobilisasi Kapal Type TSHD 4000	mil	1	Rp1.520.900,00
48	Mobilisasi Kapal Type Clamshell Digandeng dengan Tug Boat 2 x 1000 PK	mil	1	Rp1.352.800,00
49	Pekerjaan Pembangunan Menara Suar 40 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	Rp4.472.137.272,00
50	Pekerjaan Pembangunan Menara Suar 40 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	Rp6.531.733.206,00
51	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 30 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	Rp1.679.847.903,00
52	Pekerjaan Pembangunan Menara Suar 30 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	Rp3.814.755.167,00
53	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 20 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	Rp1.247.941.001,00
54	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 20 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	Rp2.234.259.878,00
55	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	Rp986.958.410,00
56	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	Rp877.333.665,00
57	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	Rp821.342.791,00
58	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Laut (Konstruksi BajaGalvanis)	Paket	1	Rp992.795.904,00

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
59	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Laut (Konstruksi Baja Galvanis)	Paket	1	Rp1.041.199.765,00
60	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Laut (Konstruksi Beton)	Paket	1	Rp1.086.574.581,00
61	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Darat (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	Rp832.636.576,00
62	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Darat (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	Rp737.460.808,00
63	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 7,5 M Di Darat (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	Rp658.591.000,00
64	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Laut (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	Rp1.002.521.125,00
65	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Laut (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	Rp957.588.765,00
66	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 7,5 M Di Laut (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	Rp927.701.765,00
67	Pengerukan dengan Kapal Non Hopper - Karang (95.040 m3)	Paket	1	Rp27.728.498.335,69
68	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000	Paket	1	Rp332.392.416,16
70	Pengadaan Bus Air Roro 30 pax type Katamaran 14 meter (DAK)	unit	1	Rp9.590.945.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

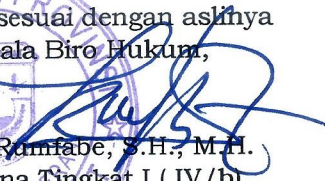
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Yonas Ramfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERKERETAAPIAN

No	NAMA PEKERJAAN	unit	Volume	Harga Satuan
1	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.33/38 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42	m'sp	1	Rp3.390.559,00
2	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42/54 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42/54	m'sp	1	Rp3.037.069,00
3	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton Rel R.54	m'sp	1	Rp3.508.706,00
4	Pengadaan / Pembangunan Kereta Makan (MP3) Dilengkapi AC	kereta	1	Rp47.621.147.249,00
5	Pengadaan / Pembangunan Kereta Ekonomi (K3) Dilengkapi AC Tanpa Dilengkapi Fasilitas Penyandang Cacat	kereta	1	Rp4.012.231.762,00
6	Pengadaan / Pembangunan Kereta Ekonomi (K3) Dilengkapi AC Dilengkapi Fasilitas Penyandang Cacat	kereta	1	Rp3.999.011.035,00
7	Pembangunan Jalan KA Baru 1 km' Jalan Rel dengan Satu Emplasemen 2 Spoor Sidding Sepanjang 400 m	km'sp	1	Rp25.649.474.962,00
8	Pembangunan Jembatan Baja KA	paket	1	Rp81.404.182.571,00
9	Pembangunan Gardu Traksi/Substation Kereta Api	paket	1	Rp42.325.157.997,00
10	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.33/38 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42	m'sp	1	Rp3.082.325.978,00
11	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42/54 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42/54	m'sp	1	Rp2.760.971.584,00
12	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton Rel R.54	m'sp	1	Rp3.189.732.631,00
13	Pengadaan / Pembangunan Kereta Makan (MP3) Dilengkapi AC	unit	1	Rp4.329.224.771,00
14	Pengadaan / Pembangunan Kereta Ekonomi (K3) Dilengkapi AC Tanpa Dilengkapi Fasilitas Penyandang Cacat	unit	1	Rp3.635.464.576,00
15	Pembangunan Jembatan Baja KA	paket	1	Rp74.003.802.336,00
16	Pembangunan Jalan KA Baru 1 km' Jalan Rel dengan Satu Emplasemen 2 Spoor Sidding Sepanjang 400 m	km'sp	1	Rp23.317.704.510,00
17	Pembangunan Gardu Traksi/Substation Kereta Api	gardu	1	Rp38.477.416.360,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

KEBANDARUDARAAN

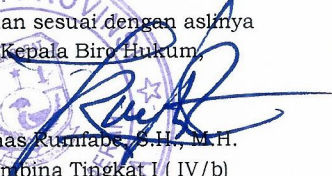
NO	NAMA PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGASATUAN
1	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Penetrasi, Tebal = 7,5 Cm (m2)	m2	1	195,22056
2	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Penetrasi, Tebal = 5 Cm	m2	1	120,58051
3	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Kolakan, Tebal = 7,5 Cm	m2	1	212,90405
4	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Kolakan, Tebal = 5 Cm	m2	1	137,00724
5	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Beton (AC), Tebal = 7,5 Cm	m2	1	282,41929
6	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Beton (AC), Tebal = 5 Cm	m2	1	184,39325
7	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Asphalt Treated Base (ATB), Tebal = 7,5 Cm	m2	1	245,59916
8	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Asphalt Treated Base (ATB), Tebal = 5 Cm	m2	1	170,0394
9	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Cement Treated Base Course (CTBC), Tebal = 25 Cm	m2	1	249,8994
10	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Beton Semen (Rigit Pavement) Tebal = 35 Cm	m2	1	2.337.976,85
11	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal Beton Tebal Rata-Rata 7,5 Cm	m2	1	957,14512
12	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal Beton Tebal Rata-Rata 5 Cm	m2	1	924,90539
13	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal KolakanTebal Rata-Rata 7,5 Cm	m2	1	635,9201
14	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan Dengan Aspal Kolakan Tebal Rata-Rata 5 Cm	m2	1	868,80015
15	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan Dengan Aspal Penetrasi Tebal Rata-Rata 7,5 Cm	m2	1	618,23661
16	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal Penetrasi Tebal Rata-Rata 5 Cm	m2	1	543,59655
17	Pekerjaan Pengecatan / Marking	m2	1	74,02029
18	Pengadaan dan Pemasangan Garbarata	paket	1	12.139.656.600,00
19	Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Walk Through Metal Detector (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Asuransi)	paket	1	110.725.910,00
20	Pengadaan Dan Pemasangan Multi View X-Ray Cabin	paket	1	1.861.575.750,00
21	Pengadaan Dan Pemasangan Multi View X-Ray Bagasi	paket	1	2.801.775.750,00
22	Pengadaan Dan Pemasangan Multi View X-Ray Cargo	paket	1	4.667.775.750,00
23	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Cargo Dengan Threat Image Protection (TIP) (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Site Training)	paket	1	956.775.750,00
24	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Bagasi Dengan Threat Image Protection (TIP) (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Site Training)	paket	1	715.575.750,00
25	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Cabin Dengan Threat Image Protection (TIP) (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Site Training)	paket	1	639.575.750,00
26	Pemasangan / Instalasi Jaringan FIDS	paket	1	290.557.778,03
27	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)2500x45 PA(Led)	paket	1	6.270.984.732,61
28	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x45 PA(Led)	paket	1	5.483.769.606,56
29	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x45 PA	paket	1	5.447.769.606,56
30	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x45 NPA	paket	1	4.963.313.391,23
31	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light,WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x30 (led)	paket	1	5.263.277.087,84
32	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x30	paket	1	5.227.277.087,84
33	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1400x30	paket	1	5.005.407.354,14
34	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1400x30 (led)	paket	1	5.041.407.354,14
35	Pengadaan dan Pemasangan RTIL (Runway Threshold Identification Light)	paket	1	724.882.240,09

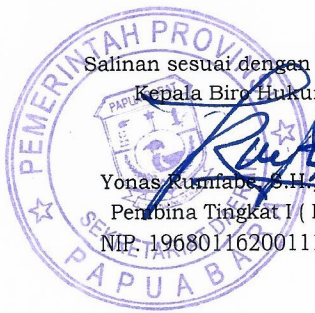
NO	NAMA PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGASATUAN
36	Pengadaan dan Pemasangan PAPI (Precision Approach Path Indicator) 1 Ujung 1 Sisi	paket	1	964.668.826,84
37	Pengadaan dan Pemasangan PAPI (Precision Approach Path Indicator) 2 Ujung 1 Sisi	paket	1	1.780.050.255,38
38	Pengadaan dan Pemasangan MALS (mediumintencity approach lighting system)	paket	1	2.085.686.450,30
39	Pengadaan dan Pemasangan PALS (pilot activated lighting system) CAT I DAN SQFL (dengan inset)	paket	1	8.184.276.934,36
40	Pengadaan dan Pemasangan PALS (pilot activated lighting system) CAT I DAN SQFL	paket	1	8.064.173.067,16
41	Pengadaan dan Pemasangan PIDS	paket	1	571.312.000,00
42	Pengadaan dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCT)	paket	1	763.577.000,00
43	Pengadaan dan Pemasangan Access Door	paket	1	126.174.100,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001



LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Jasa Konsultansi

HARGA BARANG DAN JASA

NO	SUB KEGIATAN	KUALITAS	SATUAN	STANDART HARGA	IKK MANOKWARI	JUMLAH HARGA
1	Perencanaan FS/DED/SID/RIP/Masterplan/Studi Perencanaan kapal ro-ro 70 pax (DAK)	1,00	Paket			200.000.000,00
2	Pengawasan Pengawasan kapal ro-ro 70 pax (DAK)	1,00	Paket			627.165.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

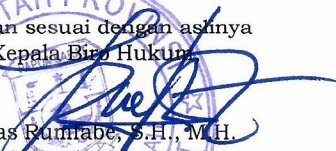


LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

KETENAGALISTRIKAN
TAHUN 2025

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Jaringan Listrik Rumah Tangga Sederhana (RTS)	Unit	4.288.500	
2	Jaringan Listrik Pedesaan (JTM)	KMS	744.900.000	
3	Jaringan Listrik Pedesaan (JTR)	KMS	520.267.000	
4	Jaringan Listrik PJI	Tiang	21.275.000	
5	Pemeliharaan PJI Tenaga Surya	Paket	108.000.000	
6	Pemeliharaan PLTS Terpusat 2MW	Paket	21.560.000	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Yonas Rumabe, S.H., M.H.
Perbina Tingkat I (IV/b)
NIP.196801162001111001

LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DAK) TAHUN 2025

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembangunan Turap Penahan Tanah (revetment) Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	Meter	8.000.000	DAK
2	Peningkatan Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	Meter3	36.000.000	DAK
3	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	Meter3	10.000.000	DAK
4	Pembangunan Drainase Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	Meter	1.700.000	DAK
5	Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	Paket	418.150.000	DAK
6	Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	Paket	900.000.000	DAK
7	Pembangunan Pos Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	M2	6.500.000	DAK
8	Pengadaan Alat Komunikasi Pelayaran dan Komunikasi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	Paket	400.000.000	DAK
9	Pengadaan Alat Komunikasi Pelayaran dan Komunikasi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Sorong	Paket	400.000.000	DAK
10	Rehabilitasi Bak Pemijahan, Kolam Induk dan Kolam Calon Induk BBIS Masni	Paket/ 100 M2	100.000.000	DAK
11	Rehabilitasi Bangunan Panti Benih BBIS Masni	Paket	140.000.000	DAK
12	Pengadaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk BBIS Masni	Paket	84.000.000	DAK
13	Pembangunan Pondok Jaga Kawasan Konservasi (KKPD) Kaimana	meter2	9.000.000	DAK
14	Pengadaan Sarana Monitoring Biofisik Target Konservasi (Alat Selam, GPS dan Camera Underwater) Konservasi KKPD Kaimana	Paket	150.000.000	DAK
15	Pengadaan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi KKPD Kaimana	Paket	172.500.000	DAK
16	Pengadaan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch (Seksi II KKPD	Paket	172.500.000	DAK
17	Pengadaan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi KKPD Jeen Womom	Paket	172.500.000	DAK
18	Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Kaimana	Unit	760.000.000	DAK
19	Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch (Seksi II KKPD Kaimana di Fakfak)	Unit	760.000.000	DAK
20	Pengadaan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi KKPD Jeen Womom Tambrau	Unit	760.000.000	DAK
21	Perencanaan Pembangunan Turap Penahan Tanah (revetment) Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	paket	92.000.000	P. DAK
22	Pengawasan Pembangunan Turap Penahan Tanah (revetment) Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	paket	138.000.000	DAK
23	Perencanaan Peningkatan Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	200.000.000	P. DAK
24	Pengawasan Peningkatan Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	300.000.000	DAK
25	Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	paket	30.000.000	P. DAK
26	Pengawasan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	paket	40.000.000	DAK
27	PerencanaanPembangunan Drainase Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	40.500.000	P. DAK
28	Pengawasan Pembangunan Drainase Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	52.000.000	DAK
29	Perencanaan Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	16.000.000	P. DAK
30	Pengawasan Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	20.500.000	DAK

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
31	Perencanaan Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	paket	27.000.000	P. DAK
32	Pengawasan Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	paket	36.000.000	DAK
33	Perencanaan Pembangunan Pos Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	paket	15.500.000	P. DAK
34	Pengawasan Pembangunan Pos Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	paket	19.500.000	DAK
35	Perencanaan Rehabilitasi Kolam Pemijahan, Kolam Induk dan Kolam Calon Induk BBIS Masni	paket	168.000.000	P. DAK
36	Pengawasan Rehabilitasi Kolam Pemijahan, Kolam Induk dan Kolam Calon Induk BBIS Masni	paket	200.000.000	DAK
37	Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Panti Benih BBIS Masni	Paket	10.000.000	P. DAK
38	Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Panti Benih BBIS Masni	Paket	14.000.000	DAK
39	Perencanaan Pembangunan Pondok Jaga Kawasan Konservasi (KKPD) Kaimana (Kambala, Adi Jaya, Togarni dan Boiya)	Paket	50.000.000	P. DAK
40	Pengawasan Pembangunan Pondok Jaga Kawasan Konservasi (KKPD) Kaimana (Kambala, Adi Jaya, Togarni dan Boiya)	Paket	65.000.000	DAK
41	Perencanaan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Kaimana	Paket	22.500.000	P. DAK
42	Pengawasan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Kaimana	Paket	30.000.000	DAK
43	Pengawasan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch (Seksi II KKPD	Paket	22.500.000	P. DAK
44	Perencanaan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch (Seksi II KKPD	Paket	30.000.000	DAK
45	Perencanaan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Jeen Womom Tambrauw	Paket	22.500.000	P. DAK
46	Pengawasan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Jeen Womom Tambrauw	Paket	30.000.000	DAK
47	Pembangunan/Rehabilitasi Penahan Gelombang (breakwater)	M3	3.000.000	DAK
48	Pembangunan/Rehabilitasi Turap Penahan Tanah (revetment)	M3	8.000.000	DAK
49	Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga	M2	36.000.000	DAK
50	Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Pelabuhan	M3	300.000	DAK
51	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase	M	1.700.000	DAK
52	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Kompleks (Beton)	M2	2.500.000	DAK
53	Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan (TPI)	M2	7.000.000	DAK
54	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Air (Tawar) Bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara dan tanki)	paket	1.000.000.000	DAK
55	Pembangunan/Rehabilitasi Kantor pelayanan Kesyahbandaran Perikanan	M2	6.500.000	DAK
56	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo)	paket	1.000.000.000	DAK
57	Pembangunan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	paket	2.500.000.000	DAK
58	Sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran (berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi, kendaraan operasional syahbandar)	paket	1.000.000.000	DAK
59	Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan PNBK perikanan tangkap (komputer, jaringan internet, CCTV, troli, keranjang, pagar pembatas kawasan pembongkaran ikan, kanopi area pembongkaran ikan)	paket	1.000.000.000	DAK
60	Pembangunan/Rehabilitasi Bak Pemijahan, Kolam Induk dan Kolam Calon Induk	M2	4.200.000	DAK
61	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Panti Benih	paket	140.000.000	DAK
62	Pembangunan Saluran Air Pasok dan/atau Buan	M	3.220.000	DAK

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
63	Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan/atau Buan	M	1.680.000	DAK
64	Pengadaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk	paket	84.000.000	DAK
65	Pembangunan/Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi (KKPD)	M2	9.000.000	DAK

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

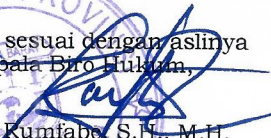
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

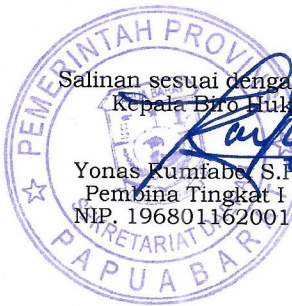
LAMPIRAN XXI PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

JARINGAN INTERNET DAN WEBSITE
TAHUN 2025

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Material & Jasa Instalasi Jaringan Fiber Optik 24 core	km	Rp175.000.000,00	
2	Material & Jasa Instalasi ruang data center & NOC	set	Rp60.000.000,00	
3	Material & Jasa Instalasi ruang smart Government	Gedung (5 ruangan)	Rp25.000.000,00	
4	Pembangunan Sistem Informasi Kabupaten/Kota (Website)	Unit	Rp15.000.000,00	
5	Pembangunan Sistem Counter Surveilancer	Unit	Rp2.180.171.600,00	Rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara
6	Pembangunan Tower Triangle	Unit	Rp273.114.000,00	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Kumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001



LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERANGKAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP (DAK)
TAHUN 2025

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengadaan Spectrophotometer UV VIS	Paket	350.000.000	DAK

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Yonas Rumiabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001



LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI KAMPUNG
TAHUN 2025

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengadaan Jaringan Telekomunikasi Data dan Internet Distrik dan Kampung SAIK PLUS	Bulan	25.000.000	
2	Sewa Hosting SAIK PLUS	Tahun	59.000.000	
3	Sewa Jasa Programmer SAIK PLUS	Orang	8.000.000	
4	Sewa Jasa Network IT dan Virtual SAIK PLUS	Orang	6.000.000	
5	Pembangunan Tower BTS 4 Kaki 70M	Unit	1.800.000.000	
6	Audit Independen Kerentanan Aplikasi SAIK PLUS	Orang	15.000.000	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Yonas Rumfape, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001